

# ANALISIS EKONOMI BASIS DAN POTENSI SINERGI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR DAN KOTA PEKANBARU

**Sri Endang Kornita**

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Km 12,5 Panam

## ABSTRAKSI

*Dalam era otonomi daerah, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Peluang untuk melakukan sinergi antar daerah terbuka sebagai alternatif untuk dapat mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan sektor basis dapat dianalisis potensi sinergi dalam kebijakan pembangunan daerah dan agar lebih berhasil juga dengan melakukan identifikasi terhadap peluang, permasalahan, dan hambatan untuk sinergi antar Kabupaten dan Kota (Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru). Adapun faktor-faktor pokok yang mempengaruhi dan strategi yang dapat digunakan dalam upaya sinergi antar daerah dalam kebijakan pembangunan antara lain; mewujudkan organisasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ramping, profesional, dan dinamis; menyusun rencana pengembangan antar wilayah secara berimbang; memanfaatkan cadangan sumber daya alam dan lingkungan secara arif; membangun sarana dan prasarana pendukung interaksi antar daerah; membentuk lembaga yang memayungi sinergi antar daerah; dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

**Kata Kunci : pembangunan, sinergi, kebijakan.**

## PENDAHULUAN

Kabupaten dan Kota merupakan daerah yang tidak dapat diabaikan dalam pengkajian pembangunan wilayah, kota sebagai *center* kegiatan wilayah dan kabupaten sebagai *hinterlandnya* merupakan suatu mekanisme, sehingga perlu adanya pendekatan untuk menjembatani kesenjangan antara daerah tersebut.

Sistem interaksi antar wilayah, terutama interaksi desa-kota dapat memberikan gambaran keterkaitan dan saling ketergantungan (*interdependensi*) antar wilayah baik. Identifikasi dan pengembangan potensi interaksi antar wilayah dapat dijadikan dasar bagi wilayah-wilayah terkait untuk mengelola secara bersama-sama sumber daya pembangunan yang dimiliki wilayah tersebut sehingga terbentuk sinergi antar wilayah dalam proses pembangunannya.

Kajian terhadap dua daerah dengan kondisi yang berbeda dimana satu daerah merupakan *hinterland* atau daerah dukung bagi daerah yang lain dapat dijadikan sebagai bahan kajian awal untuk mencari pola sinergi yang tepat dalam pembangunan antar wilayah. Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang berdampingan secara langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dapat mewakili gambaran daerah perdesaan dan Kota Pekanbaru sebagai daerah perkotaan, untuk mengkaji model keterkaitan desa-kota guna mencari format sinergi antar wilayah di Provinsi Riau.

**Tabel 1 : Kondisi Fisik, Sosio-Demografi, dan Ekonomi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, tahun 2008**

<b>Kondisi</b>		<b>Kabupaten Kampar</b>	<b>Kota Pekanbaru</b>
<b>a. Fisik</b>			
-	<b>Luas Wilayah</b>	<b>11.707,64 km<sup>2</sup></b>	<b>632,26 km<sup>2</sup></b>
-	<b>Panjang Jalan</b>	<b>1.855,58 km</b>	<b>2.593.105 km</b>
	Aspal	327,13 km	921.370 km
	Semenisasi	0,40 km	- km
	Kerikil	1.125,35 km	25.484 km
	Tanah	402,70 km	1.646.251 km
<b>b. Sosio-demografi</b>			
-	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>524.296 jiwa</b>	<b>625.313 jiwa</b>
-	<b>Jumlah Angkatan Kerja</b>	<b>322.127,46 jiwa (61,44%)</b>	<b>251.679 jiwa (40,25%)</b>
-	<b>Kepadatan Penduduk</b>	<b>45 jiwa/km<sup>2</sup></b>	<b>989 jiwa/km<sup>2</sup></b>
<b>c. Ekonomi</b>			
-	<b>PDRB</b>	<b>523.466,66</b>	<b>1.476.557,76</b>
	Pertanian	200.793,23	13.710,94
	Penggalian	71.776,94	762,80
	Industri Pengolahan	52.111,31	125.220,18
	Listrik, Gas dan Air	1.425,86	35.481,00
	Bangunan	31.208,27	214.700,99
	Perdggan, Hotel & Rest.	66.730,17	457,370.11
	Pengangkutan & Kom.	28.784,43	236.736,89
	Keuangan	23.364,04	205.680,64
	Jasa-Jasa	47.272,41	186.894,21
-	<b>Pendapatan per kapita(Rp)</b>	<b>998.418,18</b>	<b>2.361.309,87</b>
-	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,27 %</b>	<b>7,97 %</b>

**Sumber : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2009**

Tujuan dalam kajian ini adalah: 1). Mencari apa yang menjadi sektor basis pada Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru untuk mendukung sinergi antar daerah. 2). Menganalisis strategi bagi kebijakan berkaitan dengan sektor basis dalam mendukung potensi sinergi dalam kebijakan pembangunan antar daerah tersebut?

Pemahaman umum tentang potensi daerah/wilayah, adalah faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah/wilayah tertentu yang dapat digunakan dan bermanfaat guna pembangunan daerah. Dalam kajian pembangunan wilayah, yang dimaksud potensi wilayah berkaitan langsung dengan sumber daya yang dimiliki daerah terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (Alkadri dalam Ambardi, 2002). Karena tak ada satupun daerah yang memiliki karakteristik yang sama, baik potensi ekonomi, sumber daya manusia, maupun kelembagaan masyarakatnya, untuk itu maka kebijaksanaan yang bersifat nasional harus luwes (*flexible*), agar aparat pemerintah dibawahnya dapat mengembangkan dan memodifikasi kebijaksanaan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah (Kartasasmita 1997).

Dalam *Master Plan Riau 2020 (2003)* dijelaskan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama/sinergi antar pemerintah daerah pada dua daerah atau lebih, yaitu; 1) efisiensi yang lebih tinggi karena skala ekonomi, 2) beberapa solusi yang mungkin direalisasikan karena dilakukan penggabungan sumber daya, dan 3) posisi tawar yang lebih kuat. Manfaat potensial lainnya yang bisa diperoleh dari kerjasama antar daerah adalah kesempatan dalam mendukung pembangunan yang merata bagi seluruh Provinsi.

Sinergi secara umum dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kerjasama yang terjadi secara timbal balik dengan koordinasi antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan hasil yang diperoleh menjadi lebih baik. Dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan wilayah, sinergi bisa dipahami sebagai suatu proses dan aktifitas perekonomian yang terspesialisasi antar daerah; dimana daerah yang andal pada sektor tertentu akan memprioritaskan pembangunan ekonominya pada sektor tersebut demikian juga daerah lainnya, selanjutnya antar daerah akan saling mengisi dan mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui kegiatan perekonomian yang terarah pada sektor andalan dengan komparatif dan kompetitif advantage yang dimiliki maka pembangunan ekonomi daerah menuju kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih cepat terealisasi (Kornita, 2004).

## METODE ANALISIS

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Objektivitas dari hasil penelitian merupakan sintesis dari tujuan satu, dua, dan tiga, sehingga permasalahan keempat akan terjawab setelah urutan analisis penelitian dilakukan mulai dari permasalahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagai objektivitas hasil penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Adapun data yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah data sekunder time series selama lima tahun (2004-2008) untuk menentukan sektor basis pada daerah kajian. Selanjutnya data sekunder berupa dokumen kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan metode Location Quotients (LQ), yaitu sektor potensial pada masing-masing daerah analisis melalui penghitungan nilai PDRB persektor. Location Quotients (LQ) adalah sebuah indeks yang mengukur *overspecialization* atau *underspecialization* dari sektor tertentu dalam suatu daerah. LQ mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah dalam aktifitas sektor perekonomian tertentu. Pengertian relatif dapat diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih besar dimana daerah yang diamati merupakan bagian dari wilayah tersebut. Wilayah yang lebih luas disebut dengan wilayah referensi. Untuk kajian ini, maka wilayah Provinsi Riau adalah merupakan wilayah referensi.

Formula LQ dengan menggunakan variabel kontribusi PDRB persektor (Alkadri dalam Ambardi, 2002) dengan formulasi:

$$LQ = \frac{E_i^R / E^R}{E_i^N / E^N}$$

Dimana :

$$E_i^R = \text{jumlah kontribusi PDRB pada sektor } i \text{ di daerah } R$$

$$E^R = \text{jumlah kontribusi PDRB di daerah } R$$

$$E_i^N = \text{jumlah kontribusi PDRB pada sektor } i \text{ di daerah referensi } N$$

$E^N$  = jumlah kontribusi PDRB di daerah referensi N

Jika  $LQ > 1$ , maka daerah tersebut relatif terspesialisasi secara berlebihan (*overspecialised*) pada aktifitas ekonomi (sektor) yang bersangkutan.

Jika  $LQ = 1$ , maka daerah tersebut tidak terspesialisasi secara berlebihan ataupun kurang terspesialisasi pada aktifitas ekonomi yang dimaksud.

Jika  $LQ < 1$ , maka daerah tersebut relatif kurang terspesialisasi pada aktifitas ekonomi yang dimaksud.

Analisis terhadap kebijakan dan kerangka program yang telah ada dideskripsikan dengan analisis data sekunder dan hasil interview dengan pengambil kebijakan di daerah tersebut. Identifikasi peluang, permasalahan dan hambatan dalam peningkatan sinergi dilakukan dengan Strength, Weakness, Opportunity, Threat analysis (SWOT analisis), selanjutnya identifikasi faktor-faktor pokok dan strategi untuk peningkatan sinergi merupakan rekomendasi dari hasil analisis kajian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai hasil penelitian yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan sinergi pada daerah lain yang ada di Provinsi Riau maupun sebagai referensi bagi wilayah lain.

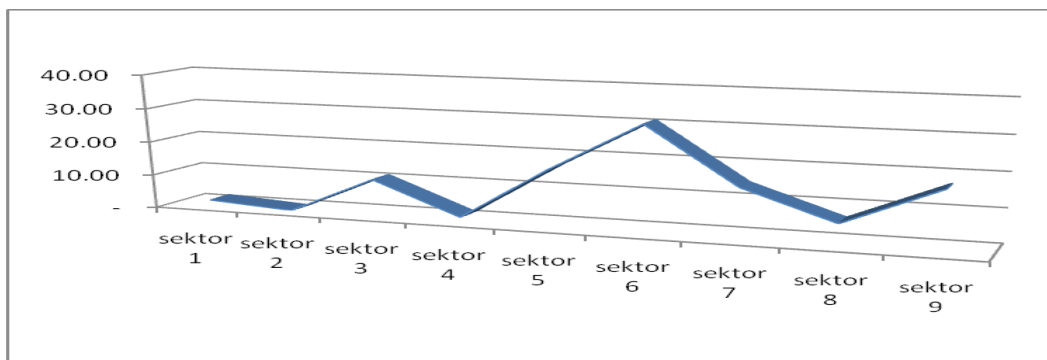
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor basis merupakan sektor yang memiliki peranan dalam suatu perekonomian wilayah sehingga kemajuan dan kemunduran sektor ini akan mampu membawa pengaruh terhadap perekonomian wilayah tersebut. Teori basis ekonomi yang melandasi pemahaman terhadap sektor basis dalam pembangunan wilayah dipergunakan untuk mengetahui potensi atau peranan suatu sektor dalam perekonomian wilayah dan efek yang ditimbulkannya (Richardson, 2002).

Aktifitas-aktifitas pada sektor basis akan menghasilkan pendapatan basis, sedangkan aktifitas-aktifitas non basis akan menghasilkan pendapatan non basis. Penjumlahan pendapatan basis dan non basis merupakan pendapatan total dari daerah/wilayah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008). Implikasi dari aktifitas sektor basis adalah dengan bertambahnya aktifitas sektor basis dalam suatu daerah maka akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah tersebut, sehingga peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan sektor basis tersebut akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa pada daerah itu.

Potensi daerah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sebagai sektor basis menggunakan variabel persentase distribusi sektor-sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 2000 untuk periode waktu 2004-2008. Rata-rata persentase kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah dari data time series PDRB menjadi dasar perhitungan bagi melihat trend sektor basis di Kota Pekanbaru dengan metode LQ, diperoleh rata-rata persentase kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor perdagangan, dan sektor penyumbang rata-rata terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian (lihat gambar 1).

**Gambar 1 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kota Pekanbaru, Tahun 2004-2008**



Keterangan :

- Sektor 1 = Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
- Sektor 2 = Pertambangan dan Pengalihan
- Sektor 3 = Industri Pengolahan
- Sektor 4 = Listrik, Gas dan Air Bersih
- Sektor 5 = Bangunan
- Sektor 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Sektor 7 = Angkutan dan Komunikasi
- Sektor 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Sektor 9 = Jasa-jasa

Sektor yang menonjol perannya dalam perekonomian Kota Pekanbaru secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor 4 (Listrik, Gas, dan Air Minum), Sektor 8 (Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan), Sektor 5 (Bangunan), Sektor 7 (Pengangkutan dan Komunikasi), Sektor 9 (Jasa-jasa) dan Sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran). Kontribusi sektor tersebut dalam struktur perekonomian berdasarkan angka rata-rata pertahun terlihat pada tabel berikut. Kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kota Pekanbaru selama periode 2004-2008 diberikan oleh Sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran), dimana kontribusinya rata-rata 30,91 persen pertahun.

**Tabel 2 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kota Pekanbaru Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2004-2008**

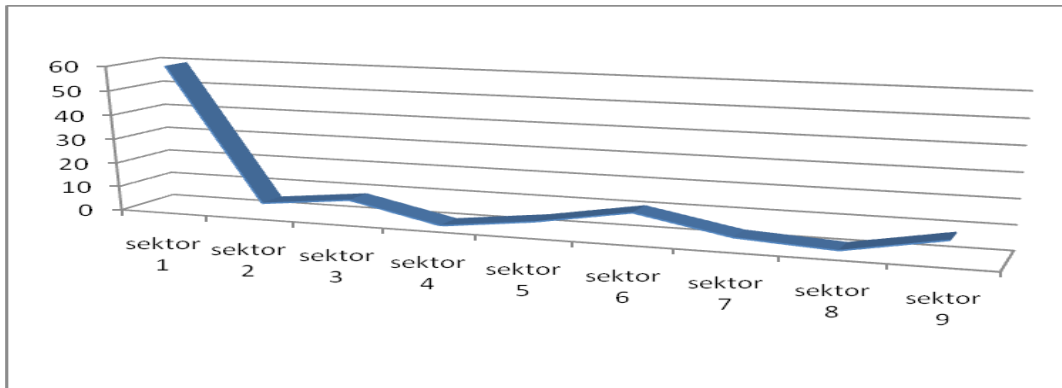
Tahun	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor 5	Sektor 6	Sektor 7	Sektor 8	Sektor 9
<b>Struktur Ekonomi (%)</b>									
2004	1.87	0.03	11.54	1.40	17.32	30.27	14.77	5.17	17.63
2005	1.77	0.03	11.31	1.32	17.10	30.75	14.61	5.87	17.22
2006	1.68	0.03	10.99	1.27	16.89	30.81	14.62	6.49	17.22
2007	1.60	0.03	10.67	1.21	16.76	31.27	14.57	6.76	17.13
2008	1.52	0.03	10.40	1.19	16.74	31.44	14.76	6.83	17.10
Rata-rata	1.69	0.03	10.98	1.28	16.96	30.91	14.67	6.22	17.26
<b>Basis/ Non Basis</b>									
<b>LQ</b>	0.04	0.02	0.64	2.67	2.52	1.80	2.47	2.56	1.71

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Pekanbaru, PDRB Kota Pekanbaru, beberapa edisi, diolah.

Berdasarkan tabel 2, Hasil perhitungan nilai LQ berdasarkan kontribusi PDRB, yaitu Sektor 4 (Listrik, Gas, dan Air Minum) dan Sektor 5 (Bangunan/konstruksi), Sektor 8 (Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan), Sektor 7 (Pengangkutan dan Komunikasi), Sektor 9 (Jasa-jasa) dan Sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran) merupakan sektor basis kota Pekanbaru.

Kabupaten Kampar menggunakan analisis yang sama dengan Kota Pekanbaru. Hasil perhitungannya, potensi perekonomian daerah ini sangat besar pada Sektor 2 (Penggalian), namun dalam struktur perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Kampar, Sektor 1 (Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan) paling berperan, sebaliknya Sektor 4 (Sektor Listrik, Gas dan Air minum) dapat dikatakan tidak berkembang dan merupakan sektor yang paling rendah perannya (lihat gambar 2).

**Gambar 2 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2004-2008**



Kabupaten Kampar juga menjadi daerah utama bagi Sektor 2 (Sektor Penggalian) di Provinsi Riau, karena memiliki potensi bahan galian lebih dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Riau. Bahan galian yang telah diusahakan secara ekonomis antara lain pasir kuarsa, kerikil, tanah timbunan, dan batuan alam lainnya. Sedangkan batu bara juga merupakan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Kampar, tetapi belum diusahakan secara ekonomis. Batu bara yang terdapat di Kabupaten Kampar merupakan salah satu cadangan bagi Provinsi Riau sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

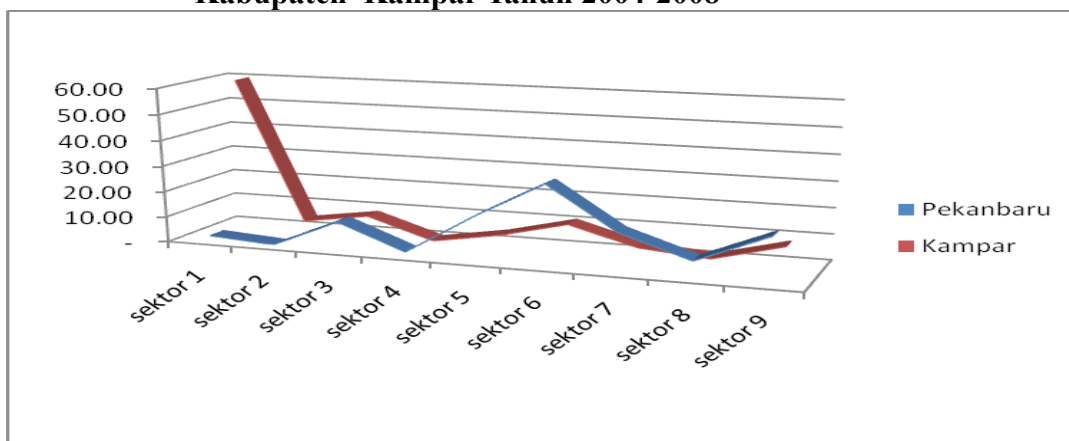
**Tabel 4 : Analisis Potensi (Sektor Basis) Kabupaten Kampar Berdasarkan Kontribusi PDRB Per Sektor, Tahun 2004-2008**

Tahun	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor 5	Sektor 6	Sektor 7	Sektor 8	Sektor 9
<b>Struktur Ekonomi (%)</b>									
2004	60.71	4.11	8.08	0.11	4.40	10.18	3.33	1.10	7.98
2005	60.60	4.15	8.04	0.11	4.26	10.41	3.37	1.15	7.91
2006	60.03	4.38	8.08	0.11	4.30	10.58	3.41	1.18	7.93
2007	59.31	4.62	8.28	0.11	4.37	10.72	3.43	1.23	7.93
2008	58.51	4.86	8.48	0.11	4.46	10.96	3.42	1.28	7.93
Rata-rata	59.83	4.42	8.19	0.11	4.36	10.57	3.39	1.19	7.94
<b>Basis/ Non Basis</b>									
<b>LQ</b>	1.55	3.13	0.47	0.22	0.65	0.62	0.57	0.49	0.79

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten kampar, PDRB Kabupaten Kampar, beberapa edisi, diolah.

Dari hasil diatas, di Kabupaten Kampar sektor pertanian masih memegang peranan yang dominan, dimana dari struktur ekonominya terbesar adalah kontribusi sektor pertanian pada PDRB. Sebaliknya Kota Pekanbaru justeru paling minimal pada sektor pertanian tersebut, kondisi ini adalah peluang yang menguntungkan bagi kedua daerah untuk saling bersinergi dalam pembangunannya. Arena Sinergi antar daerah ini dapat pula dilihat dari gambar 3 yang menyajikan rata-rata persentase kontribusi persektor PDRB dua daerah tersebut.

**Gambar 3 : Rata-rata Persentase Kontribusi Persektor pada PDRB Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Tahun 2004-2008**



Potensi sinergi yang dapat dilaksanakan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar adalah antara sektor basis di daerah yang satu dan sektor non basis pada daerah yang lain. Sebagai ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru memang memiliki infrastruktur yang memadai sehingga adalah hal yang wajar bila Pekanbaru telah memiliki sektor basis pada sektor tersier dan sekunder, dibandingkan Kabupaten Kampar yang sektor basis daerahnya adalah sektor primer.

**Tabel 5 : Sektor Basis/Non Basis Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar**

No	Sektor	Analisis LQ	
		Pekanbaru	Kampar
1	<i>Pertanian</i>		
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	<i>Listrik, Gas dan Air minum</i>		
5	Bangunan		
6	<i>Perdagangan</i>		
7	<i>Pengangkutan dan Komunikasi</i>		
8	<i>Keuangan, Persewaan &amp; Jasa Perusahaan</i>		
9	Jasa-Jasa		

**Sumber : hasil penelitian**

Dari tabel 5, maka sektor yang memiliki potensi sinergi antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru adalah:

- Sektor Pertanian (Kabupaten Kampar)
- Sektor listrik, gas dan air minum (Pekanbaru)
- Sektor Perdagangan (Pekanbaru)
- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Pekanbaru)
- Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Pekanbaru)

Untuk lebih mempertajam analisis dan pembahasan maka dipilih satu sektor di Kota Pekanbaru yang memiliki potensi sinergi dan satu sektor lain di Kabupaten Kampar. Sektor basis di Kota Pekanbaru yang mampu mendukung potensi sinergi antar kedua daerah tersebut adalah Sektor Tersier di Kota Pekanbaru terutama Sektor Perdagangan. Sektor ini merupakan sektor yang menjadi sasaran utama pembangunan di Kota Pekanbaru, hal ini secara jelas dinyatakan dalam visi dan misi Kota Pekanbaru. Sektor ini juga memberikan kontribusi terbesar pada struktur perekonomian Kota Pekanbaru, merupakan sektor basis, dan penyerap tenaga kerja yang besar di Kota Pekanbaru.

Sektor basis di Kabupaten Kampar yang mampu mendukung potensi sinergi antar kedua daerah tersebut adalah Sektor Primer (Sektor Pertanian) di Kabupaten Kampar. Sektor Pertanian di Kabupaten Kampar masih mendominasi baik dari sisi peran terhadap struktur perekonomian daerah, sebagai sektor basis ditinjau dari sisi PDRB dan juga tenaga kerja.

Kabupaten Kampar memfokuskan tujuan jangka panjang pembangunan pada prospek perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki, sedangkan Kota Pekanbaru lebih memfokuskan tujuannya menjadi pusat pelayanan bagi jasa, perdagangan, dan kebudayaan.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau selain menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan jasa dan fasilitas lain, juga merupakan pusat perdagangan di Provinsi Riau. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat perdagangan adalah dengan melaksanakan kebijakan yang perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan upaya menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kegiatan dunia usaha maupun produksi dan jasa sesuai dengan kebutuhan perdagangan.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kampar diarahkan kepada kegiatan di sektor pertanian dengan prioritas utama pertanian tanaman pangan. Kegiatan pertanian tanaman pangan cukup potensial terutama bila dilihat dari luas lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan. Produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kampar terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Secara umum, berdasarkan dokumen kebijakan yang ada sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru maupun Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Pekanbaru maupun Kabupaten Kampar masih berjalan sendiri-sendiri. Artinya, walaupun sudah mengacu pada petunjuk penyusunan dokumen kebijakan yang telah ditentukan dengan format yang sama, namun dalam proses penyusunannya setiap daerah memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Berdasarkan kajian terhadap dokumen kebijakan kedua daerah yang diteliti dan diskusi dengan pengambil kebijakan di daerah, selanjutnya dikaitkan dengan program dan kerangka kelembagaan pembangunan pada sektor basis yang berpotensi untuk sinergi, maka hal tersebut dapat dipaparkan



pada tabel 6.

**Tabel 6 : Kebijakan, Program, dan Kerangka Kelembagaan Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian**

No	Kabupaten/Kota	Kondisi yang ada
1	Kota Pekanbaru (Sektor Perdagangan)	<p>1. Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan daya saing dibidang perdagangan dengan membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh rakyat, serta menghapus segala diskriminatif dan hambatan.</li> <li>- Meningkatkan produktifitas tumbuhnya spesialisasi usaha yang mendorong percepatan pendapatan masyarakat.</li> </ul> <p>Arah kebijakan ini untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa.</li> <li>- Mensinergikan rencana pembangunan daerah yang diarahkan kepada pemanfaatan komponen daerah dengan mengedepankan aspek yang bermuatan strategis sebagai daya dukung pembangunan dan keterkaitan eksternal maupun internal, perencanaan pembangunan melalui konsultasi intensif pada forum rakorbang dengan penekanan <i>partisipatif planning</i> yang memadukan <i>top down planning</i> dan <i>bottom up planning</i>.</li> </ul>
		<p>2. Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan usaha golongan ekonomi lemah dengan bantuan dana bergulir.</li> <li>b. Peningkatan produktifitas usaha kecil dan menengah (Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)).</li> <li>c. Penyediaan informasi perdagangan dengan pengadaan balai informasi.</li> <li>d. Penataan dan penguatan basis produksi dan distribusi.</li> <li>e. Penelitian; baseline data dan identifikasi potensi.</li> <li>f. Membangun sarana dan prasarana kota.</li> <li>g. Promosi investasi.</li> </ul> <p>Program tersebut dilaksanakan agar: Tercapai pemberdayaan kehidupan ekonomi masyarakat secara adil dan merata berbasis ekonomi kerakyatan melalui program-program kegiatan pada sektor-sektor ekonomi dan infrastruktur yang handal serta menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim</p>

		<p>usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kegiatan dunia usaha sesuai kebutuhan perdagangan.</p> <p>3. Kerangka Kelembagaan : Kelembagaan pembangunan bidang perdagangan menjadi bagian tanggung jawab beberapa dinas/instansi terkait, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disperindag</li> <li>- Dinas Pasar</li> <li>- Kimpraswil</li> <li>- Dinas Pariwisata</li> <li>- Dinas Kebersihan</li> </ul>
2	Kabupaten Kampar (Sektor Pertanian)	<p>1. Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten yang berbasis pembangunan pertanian yang diarahkan pada usaha agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.</li> <li>- Pengembangan sumber daya lokal</li> </ul> <p>2. Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, perikanan, dan peternakan)</li> <li>b. Penumbuhan dan pembinaan pembenihan tanaman Pangan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Proteksi tanaman/perlindungan tanaman</li> <li>d. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan tanaman pangan, hortikultura dan gizi.</li> <li>e. Pemberdayaan petani melalui dana bergulir</li> <li>f. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>g. Peningkatan dan pembinaan usaha pertanian</li> </ol> <p>3. Kerangka Kelembagaan : Kelembagaan pembangunan bidang pertanian menjadi tanggung jawab dinas/instansi terkait, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Irigasi (TPHI)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Informasi dan Penyuluhan (KIP)</li> <li>- Kantor Ketahanan Pangan (KKP)</li> <li>- Dinas Peternakan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Kehutanan</li> <li>- Dinas Perkebunan</li> </ul>

Sumber : Hasil penelitian, diolah.

## SWOT ANALISIS

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, dan Treats*) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi bagi langkah-langkah pengambilan kebijakan (Rangkuti, 2002). Dari hasil penelitian terhadap dokumen kebijakan, program dan kerangka dasar pembangunan di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, maka untuk menjawab permasalahan penelitian ketiga dapat diidentifikasi apa yang menjadi peluang, permasalahan, dan hambatan untuk peningkatan sinergi antar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dikaitkan dengan sektor basis sebagaimana terlihat pada Tabel 9 dan Tabel 7 yang dipaparkan dalam matrik SWOT pada masing-masing daerah tersebut.

**Tabel 7 : Matrik SWOT Kota Pekanbaru**

<b>Faktor Internal</b>	
<b>Strength</b>	<b>Weakness</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibukota Provinsi</li> <li>• Jalur lintas ke daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau</li> <li>• Sarana dan prasarana lengkap</li> <li>• Kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota berikut kelembagaan Legislatif</li> <li>• Banyak Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau memiliki kantor pusat di Kota Pekanbaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas SDM bagi UKM</li> <li>• Kekurangan modal UKM</li> <li>• Minimnya informasi pasar</li> <li>• Pengelolaan limbah dan saluran air</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	
<b>Opportunity</b>	<b>Threat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru sebagai dampak berlakunya otonomi daerah</li> <li>• Implementasi Sinergi antar daerah dalam Master Plan Riau 2020</li> <li>• Interaksi/sinergi kebijakan pembangunan sektoral dan regional</li> <li>• Kecenderungan pusat perdagangan di Riau</li> <li>• Jaringan jalan sebagai sarana transportasi Konsep pembangunan partisipatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlakunya perdagangan bebas kawasan Asia (AFTA, CAFTA dll), Persaingan dengan negara tetangga (Malaysia)</li> <li>• Migrasi antar daerah</li> </ul>

Dari kondisi ini urbanisasi serta mulai malasnya pemuda desa mengembangkan pertanian menggejala dan menambah berat beban kota. Untuk itulah, pemerintah harus mendorong program pembangunan pertanian dengan upaya memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem pertanian dan usaha-usaha pertanian yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi merupakan alternatif pembangunan antar daerah yang paling menguntungkan dalam era otonomi daerah, karena dengan tekad yang sama untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah yang saling bersinergi akan mampu menjadi kekuatan baru dalam perkembangan perekonomian di wilayahnya.

**Tabel 8 : Matrik SWOT Kabupaten Kampar**

<b>Faktor Internal</b>	
<b>Strength</b>	<b>Weakness</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi ekonomi lokal, cadangan sumber daya alam dan lingkungan</li> <li>• Kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten berikut kelembagaan Legislatif</li> <li>• Kearifan lokal</li> <li>• Perusahaan swasta yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas anggota Lembaga Legislatif sangat minim</li> <li>• Kerapuhan kelembagaan adat</li> <li>• Kesenjangan alokasi pembangunan antar wilayah</li> <li>• Sistem manajemen dan pelayanan masyarakat</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	
<b>Opportunity</b>	<b>Threat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak dan posisi geografis Kabupaten dengan pasar (Pekanbaru sebagai pusat pasar Riau daratan dan kemudahan menjangkau daerah lain baik antar Kabupaten/Provinsi) serta kesesuaian lahan</li> <li>• Meningkatnya kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar sebagai dampak berlakunya otonomi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sumber daya lahan terjadi tumpang tindih dan over-eksploitasi kerusakan sumberdaya alam/lingkungan</li> <li>• Berlakunya perdagangan bebas kawasan Asia (AFTA, CAFTA dll)</li> <li>• Kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau semakin berkembang</li> <li>• Ketidak stabilan ekonomi dan kondisi internal daerah.</li> <li>• Jaringan jalan untuk kemudahan transportasi berkembang sangat lambat.</li> </ul>

Kebijakan sinergi dalam pembangunan antar daerah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar secara formal belum terlaksana, peluang untuk melakukan sinergi kebijakan pembangunan antar daerah untuk dapat mempercepat pembangunannya belum pernah dibicarakan secara formal apalagi melalui dokumen kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, namun walaupun demikian pengambil kebijakan pembangunan daerah di masing-masing wilayah menyadari dan sepakat bahwa kerjasama antar daerah berupa kemitraan, interaksi atau sinergi akan membawa prospek ekonomi yang lebih baik bagi daerahnya.

Strategi pembangunan daerah akan berbeda antara daerah yang maju (dalam hal ini digambarkan sebagai daerah modern/kota) dan daerah yang belum maju yaitu desa. Untuk strategi pembangunan wilayah pada daerah maju, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan membangun prasarana umum yang lengkap, keamanan yang terjamin, dan tidak ada hambatan struktural atau peraturan daerah yang menjadi kendala bagi penanaman modal. Dengan demikian, maka pengusaha besar dengan skala produksi/usaha yang besar, modal investasi besar, kemampuan SDM yang ahli, dan pasar komoditas yang luas akan memilih lokasi investasi didaerahnya.

Sejalan dengan pendapat Budiman(1996), Sandy (1982), Anwar (1985) dan Ricardson (2001) tentang pembangunan wilayah serta konsep Supriatna (2000) bahwa daerah membangun dalam otonomi daerah salah satu cirinya adalah tentang pentingnya optimalisasi potensi lokal. Selanjutnya berdasarkan beberapa konsep teoritis lainnya yang telah dipaparkan, maka beberapa isu dalam pembangunan wilayah guna sinergi antar daerah dapat diketengahkan, yaitu:

- Kelangkaan sumberdaya (manusia maupun materi)
- Krisis kepemimpinan, budaya politik yang tidak kondusif, menjadi kendala terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Kelangkaan kebijakan yang handal berkaitan dengan *capacity building*
- Pembangunan daerah dengan konsep pengembangan kapasitas masyarakat.
- Intervensi kebijakan publik
- Euforia otonomi daerah
- Ego sektoral dalam pembangunan daerah

Karena subyek kebijakan yang berbeda satu sama lain saling mempengaruhi satu sama lain maka perlu dibentuk koherensi kebijakan. Berdasarkan isu dan analisis kebijakan, program dan kerangka kelembagaan yang ada di kedua daerah tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinergi kebijakan antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru antara lain adalah:

- a. Potensi ekonomi lokal, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang berbeda-beda.
- b. Persepsi yang sama tentang sinergi pembangunan daerah melalui sistem perencanaan pembangunan dengan prinsip kerjasama.
- c. Stabilitas daerah, baik ditinjau dari stabilitas ekonomi, sosial maupun politik, hukum dan keamanan.
- d. Ketersediaan infrastruktur
- e. Kelembagaan yang menjadi koordinator pembangunan antar wilayah (duduk bersama pemko/pemkab koordinasi provinsi)
- f. Kapasitas lokal (pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat), dengan konsep pembangunan partisipatif.

Dikaitkan dengan isu-isu yang muncul dan upaya sinergi antar 2 (dua) kondisi yang berbeda antar dua daerah tersebut maka sebagai strategi awal dalam kebijakan antar daerah harus ada *common development policy* (kebijakan pembangunan bersama) melalui penataan pemanfaatan sumber daya alam guna menghindari eksploitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta tumpang tindihnya kebijakan pembangunan sektoral terutama dalam upaya pengembangan wilayah secara berimbang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan pengembangan kelembagaan pembangunan daerah. Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dengan konsep partisipasi aktif masyarakat.

Dari pengkajian terhadap hasil penelitian dan pembahasannya, serta berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi sinergi antar daerah ini maka dapat ditarik strategi pembangunan wilayah dalam sinergi kebijakan antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Mewujudkan organisasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ramping, profesional, dinamis sehingga mampu membuat Kebijakan Makro Pengembangan Daerah, dan meningkatkan peran *stake holders* dalam pembangunan daerah dengan upaya stabilitas wilayah. Dengan konsep *good governance*.
2. Menyusun rencana pengembangan antar wilayah secara berimbang sehingga tercipta keseimbangan distribusi aset dan arus investasi, dan melakukan penataan penggunaan sumber daya lahan
3. Memanfaatkan cadangan sumber daya alam dan lingkungan secara arif berazas pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan peran kesejajaran komunitas sebagai subyek
4. Membangun sarana dan prasarana pendukung interaksi antar daerah bersama di daerah perbatasan, misalnya sarana promosi dan pasar bersama.

5. Membentuk lembaga yang memayungi sinergi antar daerah dengan aturan yang jelas dan membangun jejaring sosial ekonomi dan pusat informasi.
6. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara profesional, menyusun Kebijakan Publik pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan komunitas, dan meningkatkan kualitas aparat dan anggota lembaga legislatif

Dengan strategi kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi, potensi dan budaya daerah maka tercapainya keberhasilan pembangunan menjadi cita-cita yang dapat direalisasikan. Keberlanjutan strategi yang ditetapkan pemerintah daerah harus sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan antara dokumen kebijakan yang satu dengan yang lainnya (misalnya antara propeda, renstra dan repetada) harus sejalan dan saling mendukung sebagai urutan langkah strategi jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Kelembagaan yang mendukung sinergi harus segera direalisasikan dalam tindakan nyata sehingga wacana dan konsep yang telah ada dalam rencana pembangunan Riau dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangun daerah. Strategi yang tepat, pembangunan yang berhasil guna dan berkelanjutan, pada gilirannya akan mampu mengangkat kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah sebagai penopang keberhasilan pembangunan nasional.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan otonomi daerah harus diorientasikan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan dan memberdayakan daerahnya melalui prakarsa kreatifitas masing-masing melalui kompetensi lokal, dimana setiap daerah harus jeli dan tepat dalam menentukan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.

Beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah a). Sinergi pembangunan antar daerah di Provinsi Riau belum terlaksana secara terkoordinasi, sampai saat ini baru sebatas arahan dalam *master plan* Riau 2020 dan konsep pada level pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota. b) Arena sinergi kebijakan pembangunan daerah yang memiliki potensi sinergi antar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dan merupakan sektor basis adalah sektor perdagangan di Kota Pekanbaru dan sektor pertanian di Kabupaten Kampar. Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi dan kompetensi lokal yang dimiliki, sarana dan prasarana pendukung memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan Kampar untuk pengembangan sektor basisnya harus ada intervensi kebijakan publik agar kondisi internal daerah mendukung bagi pelaksanaan sinergi antar daerah. c) Adanya *Asean Free Trade Area* (AFTA) sebagai zona perdagangan bebas di kawasan Asean yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dapat menjadi peluang bahkan potensial sebagai ancaman bila Riau (termasuk Pekanbaru dan Kampar) tidak siap berkompetisi dengan negara tetangga. d) Kebijakan dan Program pembangunan daerah yang belum terintegrasi dan bersifat spasial dengan manajemen proyek harus dibenahi. Kondisi internal daerah yang kurang kondusif di Kabupaten Kampar menjadi kendala pencapaian tujuan pembangunan daerah. e) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergi antar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru antara lain; Stabilitas daerah, baik ditinjau dari sisi makro ekonomi maupun politik, hukum dan keamanan; persepsi masing-masing daerah tentang sinergi pembangunan ; potensi ekonomi lokal; ketersediaan infrastruktur; kelembagaan ; dan kapasitas lokal (pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat), dengan konsep pembangunan partisipatif. f) Strategi bagi pembangunan wilayah dan sinergi kebijakan di daerah ini adalah; mewujudkan organisasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ramping, profesional, dan dinamis; menyusun rencana pengembangan antar wilayah secara berimbang; memanfaatkan cadangan sumber daya alam dan lingkungan secara arif; membangun sarana dan prasarana pendukung interaksi

antar daerah; membentuk lembaga yang memayungi sinergi antar daerah; dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bagi pencapaian tujuan pembangunan yang mendukung sinergi antar daerah di Provinsi Riau: a) Diperlukan peningkatan kapasitas manajerial di tingkat daerah (Kabupaten/Kota), untuk percepatan pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. b) Investasi di daerah juga perlu ditambahkan pada infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), yakni berupa investasi non fisik yang hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. c) Revisi dan evaluasi terhadap visi, misi, dan program/kegiatan pembangunan daerah harus menjadi agenda rutin pemerintah daerah guna mencapai hasil pembangunan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. d) Upaya menjamin stabilitas daerah terutama dari sisi ekonomi, keamanan, politik, dan hukum mendesak dilaksanakan. d) Perlu direncanakan dan diimplementasikan forum kerjasama antar daerah. e) Komitmen pimpinan daerah untuk bersama-sama saling bersinergi perlu segera direalisasikan.

Dengan terlaksananya sinergi dalam pembangunan antar daerah diyakini dapat menjadi jembatan dan memperkecil ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan antar daerah di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, Dodi Slamet Riyadi, Muchdie, Siswanto S., Fathoni M., 1999. *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Ambardi, Urbanus M., Socia Prihawantoro, 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Anwar, A dan Santoso. H., 1985. *Telaahan Potensi, Persoalan dan Dampak Pembangunan Perikanan sebagai Basis Perencanaan Wilayah : Studi Makro Regional Sektor Perikanan di Jawa Timur*. Jurnal Zona tahun 1 No. 2, Bogor.
- Arsyad, Lincolin., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi - UGM. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke 4. Cetakan 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White., 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. LP3ES. Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia. Jakarta.
- David, Fred, R., 2002. *Manajemen Strategis*, PT. Prenhalindo. Jakarta.
- Djoyohadikusumo, Sumitro., 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Pustaka Ekonomi. Jakarta.
- Dumayri, 1999. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Dunn, Willian, N., 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction*. Prentice Hall Cliffs. New Jersey.
- Febriamansyah, Rudi, 2003. *Perspektif Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan Pembangunan Ekonomi Lokal*. Makalah Workshop PDPP. Padang.
- Handayani, Wiwandari, 2003. *Pengembangan Agribisnis melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota volume 5 nomer 2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hoover, Edgar. M., 1977. *Pengantar Ekonomi Regional*. Terjemahan Aditiawan Chandra. LPFE-UI. Jakarta.
- Jamli, Ahmad dan Rahayu, Astuti., 2001. *Menggali Potensi Otonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha. Jakarta.
- Jhingan, M. L., 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kamaluddin, H. Rustian., 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Daerah*., LPFE-UI. Jakarta.

- Kartasasmita, Ginandjar., 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LPE3ES. Jakarta.
- Krisnamurthi, B., 2002. *Strategi Pembangunan Ekonomi Rakyat dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah*. PSP-IPB. Bogor.
- Krisnamurthi, B. dan Rauta. Umbu., 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. PT. Citra Adhitya Abadi. Bandung.
- Kusnadi, H, HMA., 2003. *Masalah, Kerjasama, Konflik, dan Kinerja*. Taroda. Malang.
- Masykur, Abdullah, 2002. *Analisis Penentuan Sektor Pertanian Prioritas Provinsi Riau Di Era Otonomi Daerah*. Tesis PPs IPB. Bogor.
- Mosher. AT., disadur oleh Krisnandi. S, dan Bahrin Samad, 1996. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Riau, 2003. *Master Plan Riau 2020*. PT. Townland Internasional – PPIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rangkuti, Freddy, 2002. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Richarson, W. Harry, 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. LPFE-UI. Jakarta.
- Tangkilisan, S. Hesel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. YPAPI dan Lukman Offset. Yogyakarta.
- Sandy, I Made, 1982. *Pembangunan Wilayah*. Direktorat Tata Guna Tanah Dirjend. Agraria Depdagri. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Syaukani, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sen, Amartya., 2001. *Masih Adakah harapan bagi Kaum Miskin*. Pustaka Mizan. Jakarta.
- Suhandojo, 2000. *Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tambunan, T.H. Tulus., 2001. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tarmizi, 1996. *Kebijaksanaan Pembangunan Perdesaan Dalam Konteks Pembangunan Daerah di Riau*. Tesis PPs Unand. Padang.
- Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Thomas, Vinod, 2001. *Kualitas Pertumbuhan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Winarso, Haryo, 2002. *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*. ITB. Bandung.